

HUKUM PERJUDIAN DI INDONESIA DAN DI DUNIA



Perjudian telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia selama ribuan tahun. Aktivitas ini berkembang dari sekadar permainan untung-untungan menjadi industri bernilai miliaran dolar secara global. Namun, legalitas perjudian sangat bervariasi tergantung pada norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Artikel ini akan membahas hukum perjudian secara komprehensif di Indonesia dan membandingkannya dengan regulasi di berbagai negara lain, disertai dengan implikasi sosial dan ekonominya.

A. Perjudian dalam Perspektif Hukum Indonesia

1. Definisi dan Larangan

Perjudian di Indonesia dilarang keras dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah peraturan lainnya. Pasal 303 KUHP menyatakan:

“Barang siapa tanpa mendapat izin melakukan permainan judi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.”

Pasal 303 bis KUHP memperkuat larangan ini dengan menetapkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang ikut serta dalam permainan judi, bahkan hanya sebagai pemain.

2. Aspek Agama dan Sosial

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia secara normatif mendasarkan kebijakan perjudiannya pada prinsip-prinsip agama Islam yang mengharamkan perjudian (*maisir*).



Oleh karena itu, perjudian dianggap tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika sosial.

3. Peraturan Tambahan

Selain KUHP, perjudian juga diatur dalam:

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** – yang menegaskan pelarangan segala bentuk perjudian di Indonesia.
- **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah** – yang mengatur secara lebih spesifik pelaksanaan pelarangan ini di berbagai wilayah.

Meskipun perjudian dilarang, praktiknya masih tetap eksis dalam bentuk tersembunyi seperti perjudian online, togel, sabung ayam, hingga kasino ilegal.

4. Sanksi Hukum

Pelanggaran terhadap hukum perjudian bisa dikenakan hukuman:

- Penjara mulai dari 4 bulan hingga 10 tahun.
- Denda mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.
- Penyitaan aset atau barang bukti.

5. Perjudian Online dan Tantangan Penegakan Hukum

Perjudian online menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Situs-situs judi yang dioperasikan dari luar negeri sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena kendala yurisdiksi.

6. Upaya Pemerintah:

- **Pemblokiran situs judi online oleh Kominfo.**
- **Koordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP).**
- **Kerjasama internasional untuk pelacakan lintas negara.**

Meski demikian, praktik perjudian online tetap berkembang karena tawaran keuntungan cepat dan kemudahan akses, khususnya melalui media sosial dan aplikasi komunikasi.



B. Hukum Perjudian di Berbagai Negara

1. Singapura

Singapura memiliki pendekatan pragmatis. Perjudian dilegalkan namun diawasi ketat melalui:

- **Casino Control Act** – yang mengatur kasino resmi seperti Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa.
- **Remote Gambling Act 2014** – melarang perjudian online kecuali yang dilakukan oleh operator yang memiliki izin resmi (seperti Singapore Pools).

2. Malaysia

Malaysia melarang perjudian bagi Muslim berdasarkan hukum syariah, tetapi mengizinkan bagi non-Muslim melalui:

- **Common Gaming Houses Act 1953** – mengatur operasi kasino legal seperti Genting Highlands.
- Hukum syariah diterapkan di beberapa negara bagian, melarang umat Islam dari berjudi bahkan di tempat yang sah secara hukum negara.

3. Amerika Serikat

Amerika memiliki sistem hukum federal dan negara bagian, sehingga kebijakan perjudian bervariasi:

- Negara bagian seperti **Nevada** dan **New Jersey** melegalkan kasino dan perjudian online.
- Negara bagian seperti **Utah** melarang segala bentuk perjudian.
- **Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) 2006** – membatasi transaksi keuangan terkait perjudian daring.

4. Inggris

Inggris adalah salah satu negara dengan regulasi perjudian yang paling maju dan transparan:

- **Gambling Act 2005** – melegalkan berbagai bentuk perjudian, termasuk online.
- **UK Gambling Commission** – badan pengatur independen yang mengawasi industri ini.
- Operator harus memiliki lisensi dan memenuhi standar perlindungan konsumen, termasuk kewajiban untuk mencegah kecanduan dan pencucian uang.



5. Australia

Australia mengatur perjudian secara ketat dengan legalisasi yang disesuaikan oleh masing-masing negara bagian:

- Kasino legal beroperasi di kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney.
- **Interactive Gambling Act 2001** – melarang penyedia layanan perjudian online yang tidak memiliki lisensi Australia untuk menargetkan warga negara Australia.

C. Perjudian sebagai Industri dan Dampaknya

1. Dampak Ekonomi

Perjudian legal dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian melalui:

- Pajak dan retribusi
- Penyerapan tenaga kerja
- Investasi sektor hiburan dan pariwisata

Contoh:

- Inggris memperoleh lebih dari £3 miliar per tahun dari pajak perjudian (UK Gambling Commission, 2023).
- Las Vegas dan Macau menjadi destinasi wisata utama yang menopang ekonomi lokal melalui industri kasino.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Meski berdampak ekonomi positif, perjudian juga memiliki efek negatif:

- Kecanduan atau *gambling addiction*, yang bisa menimbulkan kemiskinan, hutang, hingga bunuh diri.
- Kehancuran rumah tangga dan hubungan sosial.
- Kejahatan terkait seperti pencucian uang, penipuan, dan kejahatan terorganisir.

3. Wacana Legalisasi Perjudian di Indonesia

Wacana legalisasi perjudian di Indonesia sesekali mencuat, khususnya dalam konteks:



- Potensi penerimaan negara dari pajak
- Penertiban praktik ilegal yang sulit dikendalikan
- Penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor hiburan

Namun, wacana ini mendapat perlawanan keras dari kelompok agama, tokoh masyarakat, dan sebagian besar publik yang masih menilai perjudian sebagai aktivitas yang merusak moral dan tatanan sosial.

4. Pendekatan Alternatif: Pengaturan daripada Pelarangan Total?

Beberapa ahli hukum dan kebijakan publik mengusulkan pendekatan alternatif:

- a. **Legalisasi terbatas** di zona ekonomi khusus atau tempat pariwisata tertentu (misalnya di Bali atau Batam).
- b. **Lisensi ketat** bagi operator perjudian dengan sistem pengawasan independen.
- c. **Edukasi dan penanggulangan kecanduan** melalui program kesehatan mental.
- d. **Regulasi transaksi keuangan** untuk mencegah pencucian uang.

Namun, pendekatan ini memerlukan perubahan besar dalam struktur hukum dan moralitas sosial yang dominan saat ini.

Perjudian adalah fenomena global yang menimbulkan dilema antara manfaat ekonomi dan risiko sosial. Indonesia memilih pendekatan pelarangan total dengan dasar hukum dan agama yang kuat. Namun, tantangan di era digital, terutama perjudian online, menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti.

Sementara negara-negara lain telah mencoba menyeimbangkan antara pelarangan dan pengawasan, Indonesia masih mempertahankan pendekatan konservatif. Diskusi mengenai legalisasi atau regulasi tetap terbuka, terutama dengan mempertimbangkan realitas praktik yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan.

Daftar Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
3. Gambling Act 2005 (UK).
4. Interactive Gambling Act 2001 (Australia).
5. Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), 2006 (USA).



6. Remote Gambling Act 2014 (Singapore).
7. UK Gambling Commission Annual Report 2023.
8. Laporan Kominfo tentang Situs Judi Online, 2024.
9. Artikel “Legalized Gambling: Fiscal and Social Perspectives” dalam *Journal of Economic Perspectives*, 2022.
10. World Health Organization (WHO): Mental Health and Gambling Disorder, 2021.